

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693040/2026

Revisi ke 03

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
 - 4. Kode>Nama Satker : (693040) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
 - Sebesar : Rp. 224.029.000 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang
Rp. 224.029.000
Rp. 224.029.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	224.029.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 224.029.000

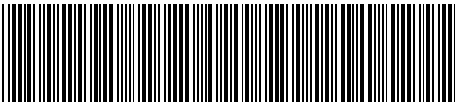
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1083-7732-9784-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693040) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

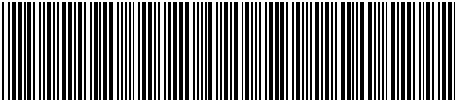
Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi				224.029.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah				224.029.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		27,00	Rekomendasi Kebijakan	192.959.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah		27.00	Rekomendasi Kebijakan	192.959.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1,00	Lembaga	30.720.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah		1.00	Lembaga	30.720.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		1,00	Laporan, Layanan	350.000
Rincian Output	:	01	FAE.X01	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah		1.00	Laporan	350.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
I B. SUMBER DANA



DS:1083-7732-9784-0641

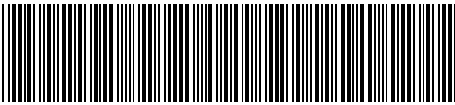
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693040) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	224.029.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	224.029.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1083-7732-9784-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693040) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

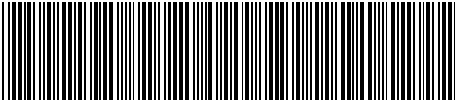
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693040	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	-	224.029	-	-	-	224.029	24 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	224.029	-	-	-	224.029		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	224.029	-	-	-	224.029		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	192.959	-	-	-	192.959		
01	RM	-	192.959	-	-	-	192.959		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	30.720	-	-	-	30.720		
01	RM	-	30.720	-	-	-	30.720		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	350	-	-	-	350		
01	RM	-	350	-	-	-	350	039	
JUMLAH		-	224.029	-	-	-	224.029		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1083-7732-9784-0641

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693040) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

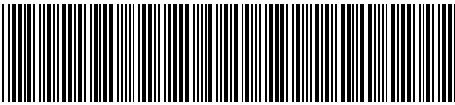
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693040	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	110.680	6.780	13.039	10.050	18.340	14.330	5.060	21.960	19.390	2.500	1.900	224.029
		BELANJA BARANG	0	110.680	6.780	13.039	10.050	18.340	14.330	5.060	21.960	19.390	2.500	1.900	224.029
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	110.680	6.780	13.039	10.050	18.340	14.330	5.060	21.960	19.390	2.500	1.900	224.029
	135.03.BB.7129	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	110.680	6.780	13.039	10.050	18.340	14.330	5.060	21.960	19.390	2.500	1.900	224.029

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
IV A. B L O K I R



DS:1083-7732-9784-0641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693040] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

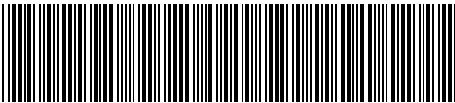
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693040/2026
IV B. C A T A T A N



DS:1083-7732-9784-0641

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693040] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001